

Judul : Promosi Judol Marak, Data Demografis Tersebar Ilegal
Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Promosi Judol Marak, Data Demografis Tersebar Ilegal

WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukanta menilai ada ancaman serius terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi warga Indonesia akibat maraknya judol. Karena, praktik judol tidak hanya terkait masalah moral dan sosial, melainkan ekonomi serta teknologi.

Sukanta melihat, praktik judol dan penyalahgunaan data saling memperkuat. Keduanya membentuk ekosistem kriminal digital yang luas dan terstruktur, mengancam stabilitas finansial serta keamanan warga negara secara serius.

Sukanta menyoroti beberapa faktor yang membuat judol makin marak. Seperti akses digital yang mudah, sehingga judol bisa dimainkan dari rumah menggunakan smartphone dan aplikasi. Kemudi-

an, masih ada kelemahan regulasi teknis, meskipun UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah berlaku.

"Implementasi pengawasan oleh Badan PDP belum optimal, dan mekanisme teknis perlindungan data masih terbatas," jelas politikus PKS itu di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menyebut, promosi judol melalui media sosial makin menjangkau generasi muda dengan penetrasi internet tinggi. Agen judol memanfaatkan data demografis dan finansial secara ilegal yang berakibat pada terancamnya privasi dan keamanan finansial warga negara.

Data pribadi dapat disalahgunakan untuk membuka rekening palsu, pinjaman ilegal, atau tran-

saksi keuangan gelap. "Stabilitas sosial terganggu karena generasi muda dan kelompok rentan terjerat praktik judol online, memicu utang, konflik keluarga, dan kerentanan sosial," imbuhnya.

Di saat yang sama, judol juga memunculkan kerugian negara melalui rekening dormant dan aktivitas ekonomi digital yang tidak tercatat. Selain itu, efektivitas pengawasan fiskal dan ekonomi digital nasional juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. "Miris, ada pemain judol dari masyarakat rentan penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah," ucap Legislator dari Dapil DIY itu.

Sebagai tindak lanjut, Sukanta mendukung Pemda yang melakukan penertiban penerima bansos

yang kedapatan bermain judol. Dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 600 ribu penerima bansos yang terindikasi terlibat judol.

"Pemprov perlu berkoordinasi dengan pihak terkait agar bansos yang selama ini dikeluarkan pemerintah bisa tepat sasaran, tidak disalahgunakan untuk judol," imbaunya.

Dia lalu memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya, penguatan regulasi dan implementasi UU PDP dengan memastikan Badan PDP aktif melakukan pengawasan, audit keamanan data, dan penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran.

"Kemudian, menyusun peraturan teknis tambahan untuk

melindungi data pribadi dari penyalahgunaan aplikasi dan platform ilegal," tegasnya.

Selain itu, perlu dikembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi aktivitas haram tersebut, serta transaksi mencurigakan berbasis data digital. Selanjutnya, kolaborasi Kepolisian, OJK, dan platform digital juga harus diperkuat untuk menutup celah penyalahgunaan data.

Sukanta menegaskan, judol bukan sekadar masalah moral, tetapi ancaman nyata bagi keamanan data, keuangan digital, dan stabilitas sosial. Pencegahan harus dilakukan secara sistematis melalui regulasi yang kuat, pengawasan siber yang optimal, dan edukasi digital yang masif. ■ PYB